



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUKUM, SUMBER DAYA MANUSIA; DAN ORGANISASI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Rahayu
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Ayodhia G.L. Kalake
Jabatan : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Maret 2025

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Ayodhia G.L. Kalake

Rahayu

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUKUM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
SK.1	Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	IKSK.1.1	Indeks Reformasi Hukum	A (Sangat Baik)
SK.2	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Elektronik	IKSK.2.1	Nilai JDIH Nasional	Eka Acalapati
SK.3	Terlaksananya Layanan Advokasi Hukum Secara Efektif dan Efisien	IKSK.3.1	Persentase Layanan Advokasi Hukum	100%
SK.4	Tersedianya Peraturan yang Harmonis dan Efektif	IKSK.4.1	Persentase Penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri Koordinator	90%
		IKSK.4.2	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Dianalisis dan Dievaluasi	80%
		IKSK.4.3	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pendampingan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	100%
SK.5	Tersedianya Naskah Hukum yang Efektif Berkualitas	IKSK.5.1	Persentase Penyelesaian Naskah Hukum (Non Peraturan)	90%
SK.6	Terwujudnya Tata Kelola yang Baik Didukung ASN yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas	IKSK.6.1	Tercapainya Tingkat Maturitas Implementasi Manajemen ASN	Baik
		IKSK.6.2	Tingkat Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian	85%
SK.7	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang Efektif, Lincah, Profesional dan Kolaboratif	IKSK.7.1	Persentase Penyelesaian Dokumen Organisasi dan Tata Laksana	100%
		IKSK.7.2	Persentase Pemahaman Budaya Kerja BerAKHLAK	85%
SK.8	Terwujudnya Layanan Ketatausahaan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	IKSK.8.1	Persentase Layanan Ketatausahaan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	100%

NO	RINCIAN OUTPUT (RO)	ANGGARAN
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp 3.750.000.000
2	Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia Internal	Rp 2.000.000.000
JUMLAH ANGGARAN		Rp 5.750.000.000

*Anggaran diblokir kode A (Efisiensi Belanja) sebesar Rp4.443.247.000 sesuai DIPA Petikan Revisi Ke-4 Nomor : SP DIPA- 132.01.1.694776/2025 tanggal 14 Maret 2025

Jakarta, 20 Maret 2025

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan

Kepala Biro Hukum, Sumber Daya
Manusia, dan Organisasi


Ayodhia G.L. Kalake


Rahayu

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO HUKUM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

INDIKATOR KINERJA		JUDUL KINERJA/RINCIAN KINERJA	TARGET TAHUNAN	JADWAL KELUARAN (TW)			
				I	II	III	IV
IKSK.1.1	Indeks Reformasi Hukum	Penilaian Indeks Reformasi Hukum	A (Sangat Baik)				√
IKSK.2.1	Nilai JDIH Nasional	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Eka Acalapati				√
IKSK.3.1	Persentase Layanan Advokasi Hukum	Laporan Penelaahan Permasalahan Hukum, Fasilitasi, dan/atau Pendampingan Penyelesaian Permasalahan Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%	√	√	√	√
IKSK.4.1	Persentase Penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri Koordinator	Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang Telah Diajukan Permohonan Harmonisasi Kepada Kementerian Hukum Berdasarkan Jumlah Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang Diajukan Oleh Setiap Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan dalam Surat Keputusan (SK) Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator (P3MK) dalam Satu Tahun Anggaran	90%				√
IKSK.4.2	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Dianalisis dan Dievaluasi	Hasil Peraturan Perundang-undangan di Lingkup Kementerian Koordinator yang Telah Selesai Dilakukan Analisa dan Evaluasi	80%				√

INDIKATOR KINERJA		JUDUL KINERJA/RINCIAN KINERJA	TARGET TAHUNAN	JADWAL KELUARAN (TW)			
				I	II	III	IV
		Berdasarkan Ketentuan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019 oleh BPHN Kementerian Hukum					
IKSK.4.3	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pendampingan dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pendampingan, Fasilitasi, dan/atau Pengawasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Dilakukan Oleh Unit Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan Terhadap Jumlah Permohonan Pendampingan Peraturan Perundang-undangan yang Masuk ke Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	100%				√
IKSK.5.1	Persentase Penyelesaian Naskah Hukum (Non Peraturan)	Tersedianya Naskah Hukum yang Efektif Berkualitas Persentase Naskah Hukum Non Peraturan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Selesai Diproses	90%				√
IKSK.6.1	Tercapainya Tingkat Maturitas Implementasi Manajemen ASN	Mengukur Sejauh Mana Instansi Telah Menerapkan Manajemen ASN Secara Terstruktur, Sistematis, dan Berkelanjutan Sesuai dengan Prinsip Meritokrasi, Peraturan Perundang-undangan, Serta Kebijakan Nasional Terkait Pengelolaan Aparatur Sipil Negara	Baik				√

INDIKATOR KINERJA		JUDUL KINERJA/RINCIAN KINERJA	TARGET TAHUNAN	JADWAL KELUARAN (TW)			
				I	II	III	IV
IKSK.6.2	Tingkat Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian	Survei atau Kuesioner yang Diberikan Kepada Pegawai untuk Mengevaluasi Pengalamannya dengan Layanan Administrasi Kepegawaian	85%		√		√
IKSK.7.1	Persentase Penyelesaian Dokumen Organisasi dan Tata Laksana Sesuai Kebutuhan	1. Dokumen Kelas Jabatan yang Ditargetkan Selesai Pada Triwulan II 2025 2. Dokumen Peta Jabatan yang Ditargetkan Selesai Pada Triwulan III 2025 3. Dokumen Peta Proses Bisnis yang Ditargetkan Selesai Pada Triwulan IV 2025	100%	-	√	√	√
IKSK.7.2	Persentase Pemahaman Budaya Kerja BerAKHLAK	Kuis Game Kahoot	85%		√		√
IKSK.8.1	Persentase Layanan Ketatausahaan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Laporan Kinerja, Laporan Arsip dan Persuratan, Laporan BMN dan Laporan Realisasi Keuangan	100%	√	√	√	√

Jakarta, 20 Maret 2025

Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia,
dan Organisasi


Rahayu